



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: **0056**/UN7.5.7.2/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PADA FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan
- b. sebagai berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Diponegoro Tahun 2020 – 2024, Rencana Kegiatan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Tahun 2020 – 2024, Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik, Meningkatkan Jumlah prodi terakreditasi Unggul : dengan cara mengoptimalkan tim penjaminan mutu fakultas dan gugus penjaminan mutu program studi;;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a & b tersebut di atas dipandang perlu mengangkat Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

- 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro Tahun 2017;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Diponegoro Nomor : 03/UN7.1/HK/2019 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022
- KESATU : Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tujuan dibentuknya Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro :
1. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 2. mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 3. mendorong semua pihak/unit di Undip untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu .
- KEDUA : Tugas Tim Penjaminan Mutu Fakultas:
1. menjabarkan Standar Akademik Universitas ke dalam Standar Akademik Fakultas;
 2. menjabarkan Manual Mutu Akademik Universitas ke dalam Manual Mutu Akademik Fakultas;
 3. mensosialisasikan Sistem Penjaminan Mutu ke semua Civitas Akademik Fakultas;
 4. pelatihan dan konsultasi kepada Civitas Akademik Fakultas tentang Pelaksanaan Penjaminan Mutu;
 5. membahas dan menindaklanjuti laporan Gugus Penjaminan Mutu (GPM);

6. melakukan Evaluasi terhadap Jurusan/Program Studi;
7. memperbaiki dan mengembangkan sistem pembelajaran; dan
8. mengirim hasil evaluasi Jurusan/Program Studi ke Badan Penjaminan Mutu Universitas;
9. Menyusun Borang 3B Fakultas Untuk Program Studi S1, S2, dan S3 bersama Tim penyusun Borang Fakultas;
10. Mengawal pelaksanaan akreditasi Program Studi S1, S2 dan S3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 17 Januari 2022
Dekan,



Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP
NIP. 196408271990011001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : **0056**/UN7.5.7.2/HK/2022
TANGGAL : 17 JANUARI 2022
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PADA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TAHUN 2022

Penanggungjawab : Dr. Drs. Hardi Warsono, M.TP

Pengarah : 1. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin
2. Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D

Ketua : Dr. Hari Susanta Nugraha, S. Sos., M.Si

Sekretaris : Dr. Dewi Erowati, S. Sos., M.SI

Anggota : 1. Dr. Hapsari Dwiningtyas Sulistyani, S.Sos., M.A.
2. Retna Hanani, S. Sos., MPP
3. Marten Hanura, S.I.P., M.P.S.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 17 Januari 2022
Dekan,



Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP
NIP. 196408271990011001